

PENDIDIKAN NASIONAL, GLOBALISASI DAN PERANAN KELUARGA

Oleh: Afdhal

Dosen Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Abstract

This present essay strives to shed a light on the implications of globalisation on Indonesia's national education. It elaborates two central questions: (1) Is Indonesia's education already functioning to play a part in the globalisation? (2) What are the toughest obstacles to the contemporary Indonesia's education and options in confronting the challenges? It subsequently offers an alternative that is the roles of family institution in minimising the impacts of the destructive side of the globalisation as well as helping the government and schooling institutions to provide better educational services.

Keywords: pendidikan nasional, globalisasi, peranan keluarga.

PENDAHULUAN

Isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan nasional dan globalisasi mendorong kita untuk melakukan identifikasi dan mencari titik-titik simetris sehingga bisa mempertemukan dua hal yang tampaknya paradoksial, yaitu pendidikan Indonesia yang berimplikasi nasional dan global. Dampak globalisasi memaksa banyak negara meninjau kembali wawasan dan pemahaman mereka terhadap konsep bangsa, tidak saja karena faktor batas-batas teritorial geografi, tetapi juga aspek ketahanan kultural serta pilar-pilar utama lainnya yang menopang.

Eksistensi mereka sebagai *nation state* yang tidak memiliki imunitas absolut terhadap intrusi globalisasi. Globalisasi bisa dianggap sebagai penyebaran dan intensifikasi dari hubungan ekonomi, sosial, dan kultural yang menembus sekat-sekat geografis ruang dan waktu. Dengan demikian, globalisasi hampir melingkupi semua hal; ia berkaitan dengan ekonomi, politik, kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, transportasi, dll.

Tulisan ini mencoba mengelaborasi jawaban atau menjelaskan dua pernyataan

kunci, yaitu: (1) Siapkah dunia pendidikan Indonesia menghadapi globalisasi? (2) Apa tantangan dan kendala yang dihadapi dunia pendidikan Indonesia saat ini dan (3) Apa alternatif solusi dalam menghadapi tantangan dan kendala tersebut?

Bagian pertama pembahasan difokuskan pada pengertian globalisasi untuk membantu memperdalam pemahaman tentang fenomena global tersebut. Kemudian analisis dilanjutkan pada dampak globalisasi terhadap dunia pendidikan. Pada bagian berikutnya, analisis dilakukan terhadap kesiapan dunia pendidikan Indonesia menghadapi globalisasi, yang dilanjutkan dengan identifikasi kondisi kontemporer dan kendala-kendala fundamental yang melingkupi dunia pendidikan Indonesia. Pada bagian akhir, analisis ditekankan pada mengapa dan bagaimana keluarga bisa memainkan peranan sangat penting dalam pendidikan. Hal ini mensyaratkan bahwa pembinaan dan usaha menjaga soliditas keluarga mutlak diperlukan untuk mengoptimalkan peranan tersebut dalam pendidikan anak.

TINJAUAN PUSTAKA

Istilah dan wawancara tentang globalisasi sering membingungkan.

‘Globalisasi’ telah menjadi sebuah ‘*buzzword*’ yang memiliki makna tersendiri dan seringkali kita baca dan dengar. Banyak pengguna istilah globalisasi memahaminya berbeda dari makna yang sesungguhnya. Realitas semacam ini bisa diterima mengingat tidak ada defInisi tunggal terhadap globalisasi. R.Robertson (1992) misalnya, merumuskan globalisasi sebagai : “... *the compression of the word and the intensification of consciousness of the world as a whole*”. P.Kotter (1995) mendefinisikan globalisasi sebagai , “... *the product if many forces, some of which are political (no major was since 1945), some of which are technological (faster and cheaper transportation and communication) and some of which are economic (mature firms seeking growth outside their national boundaries)*”.

Tetapi, dalam tulisan ini penulis cenderung mengutip pendapat J.A Scholte (2002) yang ditemukan dalam literatur. Kelima kategori defenisi tersebut berkaitan satu sama lain dan kadangkala saling tumpang-tindih, namun masing-masing mengandung unsur yang khas.

1. Globalisasi sebagai internasionalisasi

Dengan pemahaman ini, globalisasi dipandang sekedar sebuah kata sifat (*objective*) untuk menggambarkan hubungan antar-batas dari berbagai negara. Ia menggambarkan pertumbuhan dalam pertukaran dan interdependensi internasional. Semakin besar volume perdagangan dan investasi modal, maka ekonomi antar-negara semakin terintegrasi menuju ekonomi global dimana ekonomi nasional yang *distingtif* berjalan dan bergabung dalam suatu sistem melalui proses dan kesempatan internasional.

2. Globalisasi sebagai liberalisasi

Dalam pengertian ini, ‘globalisasi’ merujuk pada ‘sebuah proses penghapusan hambatan-hambatan yang

dibuat oleh pemerintah terhadap mobilitas antar negara untuk menciptakan sebuah ekonomi dunia yang ‘terbuka dan tanpa-batas’. Mereka yang berpendapat pentingnya menghapus hambatan-hambatan perdagangan dan kontrol modal biasanya berlindung dibalik mantel ‘globalisasi’

3. Globalisasi sebagai universalisasi

Dalam konsep ini, kata ‘global’ digunakan dengan pemahaman bahwa proses ‘mendunia’ dan ‘globalisasi’ merupakan proses penyebaran berbagai objek dan pengalaman kepada semua orang ke seluruh penjuru dunia. Contoh klasik dari konsep ini adalah penyebaran teknologi komputer, televisi, internet,dll.

4. Globalisasi sebagai westernisasi atau modernisasi (lebih dalam bentuk yang *Americanised*)

‘Globalisasi’ dalam konteks ini dipahami sebagai sebuah dinamika, di mana struktur-struktur sosial modernitas (kapitalisme, rasionalisme, industrialisme, birokratisme dsb) disebarkan ke seluruh penjuru dunia, yang dalam prosesnya cenderung merusak budaya setempat yang telah mapan serta merampas hak *selfdetermination* rakyat setempat.

5. Globalisasi sebagai penghapusan batas-batas teritorial (atau sebagai persebaran supra-teritorialitas)

‘Globalisasi’ mendorong rekonfigurasi geografis, sehingga ruang-sosial tidak lagi semata dipetakan dengan kawasan teritorial, jarak teritorial, dan batas-batas teritorial.’ A. Gidden (1990) mendefinisikan globalisasi sebagai ‘intensifikasi hubungan sosial global yang menghubungkan komunitas lokal sedemikian rupa sehingga peristiwa yang terjadi di kawasan yang jauh dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di suatu tempat yang jauh pula, dan sebaliknya. Dalam konteks ini, globalisasi juga dipahami sebagai sebuah ‘proses (atau serangkaian proses) yang melahirkan sebuah tranformasi

dalam *spatial organisation* dari hubungan sosial dan transaksi ditinjau dari segi ekstensitas, intensitas, kecepatan dan dampaknya yang memutar mobilitas antar-benua atau antar regional serta jejaring aktivitas.

Disamping pemahaman kelima definisi di atas, dalam konteks politik internasional, globalisasi dan dampaknya bisa pula dipahami dari berbagai teori. Di sini globalisasi ditinjau dari 3 sudut pandang yaitu realisme, liberalisme dan neo-Marxisme. Secara umum, dari realisme, globalisasi bisa dianggap sebagai mekanisme yang *by design* diciptakan oleh suatu Negara sebagai perwujudan dari konsep 'setiap negara merekayasa mekanisme yang menurut mereka paling menguntungkan bagi kepentingan masing-masing.

Sedangkan penganut liberalisme yang menganggap positif hakikat manusia mengakui bahwa individu memiliki kepentingan masing-masing dan hingga pada titik tertentu saling berkompetesi. Tetapi individu tersebut juga memiliki banyak kesamaan kepentingan yang dengan demikian mereka bisa bekerjasama baik dalam skala domestik maupun internasional yang bisa memberikan manfaat bagi semua orang secara global. Dari sudut ini kelompok liberal khususnya ekonom liberal menyambut positif globalisasi ekonomi. M. Friedman (1993) mengungkapkan bahwa saat ini : "*it is possible to produce a product anywhere, using resources from anywhere, by a company located anywhere, to be sold anywhere.*" Suatu perspektif dominan dalam kajian globalisasi khususnya tentang hubungan antara politik dengan ekonomi, dan antara negara dengan pasar adalah *International Political Economy* (IPE). Salah satu dari tiga teori utama IPE adalah neo-Marxisme yang meyakini bahwa Negara tetap berperan sebagai regulator penting dalam globalisasi, tetapi mereka secara perlahan kehilangan kontrol atas ekonomi.

Globalisasi ekonomi dianggap sebagai proses yang tidak seimbang dan hirarkis di mana kekuasaan ekonomi semakin terpusat di kalangan negara-negara industri maju.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa globalisasi adalah suatu 'makhluk' yang biasa ditinjau dari berbagai segi dan disiplin. Hal itu disebabkan oleh daya pengaruh globalisasi mampu menembus hampir semua segi kehidupan manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Dalam dunia pendidikan, globalisasi membawa banyak dampak dan efek. Dampak globalisasi terhadap dunia pendidikan paling tidak terlihat dalam tiga perubahan mendasar dalam dunia pendidikan.

Pertama, dalam perspektif neo-liberalisme, globalisasi menjadikan pendidikan sebagai komoditas dan komersil. Paradigma dalam dunia komersial adalah usaha mencari pasar baru dan memperluas bentuk-bentuk usaha secara kontinyu. Globalisasi mampu memaksa liberalisme berbagai sektor yang dulunya non-komersial menjadi komoditas dalam pasar yang baru. Pasar baru bisa muncul, menurut C. Leys (2001) kalau memenuhi 4 kriteria :

1. Rekonfigurasi produk dan layanan sehingga memiliki nilai dan layak dijual;
2. Merayu agar orang mau membelinya;
3. Mengubah perilaku melayani kepentingan bersama menjadi usaha untuk menghasilkan laba bagi pemilik modal sesuai dengan mekanisme pasar
4. Adanya jaminan negara terhadap resiko yang mungkin terjadi terhadap modal.

Tuntutan pasar ini mendorong perubahan dalam dunia pendidikan. Perubahan tersebut bisa dalam bentuk penyesuaian program studi, kurikulum, manajemen, dllsb.

Kedua, globalisasi mempengaruhi kontrol pendidikan oleh negara. Sepintas terlihat bahwa pemerintah masih mengontrol sistem pendidikan di suatu negara dengan cara intervensi langsung berupa pembuatan kebijakan dan payung legalitas. Tetapi tuntutan untuk berkompetensi dan tekanan institusi global seperti *IMF* dan *World Bank* yang membuat dunia politik dan pembuat kebijakan cenderung *market-driven*.

Ketiga, globalisasi mendorong delokalisasi dan perubahan teknologi dan orientasi pendidikan. Pemanfaatan teknologi baru seperti komputer dan internet telah membawa perubahan yang sangat revolusioner dalam dunia pendidikan yang tradisional. Disamping membantu akselerasi arus pertukaran informasi, teknologi tersebut telah ikut mendorong berjamurnya sistem pendidikan jarak-jauh. Di sini terlihat fenomena delokalisasi, di mana orang-orang belajar dalam suasana yang sangat individual dan menghalanginya untuk berinteraksi dengan tetangga atau orang-orang di sekitarnya.

Meskipun dipandang dari sudut yang berbeda, kita bisa membuat sebuah generalisasi bahwa kata kunci dari globalisasi adalah: kompetisi. Kalau sudah menyangkut kompetisi, maka kita mesti memperhatikan salah satu faktor penentu dalam kompetisi yaitu ketangguhan sumber daya manusia (SDM) yang merupakan output dari pendidikan. Oleh karena itu, relevansi antara pendidikan nasional dengan globalisasi tidak saja dalam aspek dampak tetapi juga dalam segi tantangan. Artinya, globalisasi sebagai sebuah proses yang tidak bisa diputar mundur dan terus bergulir menantang dunia pendidikan kita, karena *“the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn.”* (A. Toffler: 1990).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Siapkah Dunia Pendidikan Indonesia Menghadapi Globalisasi?

Sebelum kita menjawab apakah dunia pendidikan kita siap menghadapi globalisasi, kita perlu bertanya apakah Indonesia sudah siap menghadapi globalisasi.

Dalam summit APEC di Bogor tahun 1994, Indonesia dengan berani menerima jadwal AFTA 2003 dan APEC 2010 dengan menyatakan: siap tidak siap, suka tidak suka kita harus ikut globalisasi. Banyak pengamat menilai bahwa pada waktu itu Indonesia mengatakan ‘siap’ dalam globalisasi kurang didasarkan pada asumsi yang realistis

Dalam menilai kesiapan dunia pendidikan Indonesia menghadapi globalisasi ada baiknya kita mengukur posisi Indonesia dengan indikator-indikator terlepas dari metodologi yang dipakai oleh pembuat survey yang dianggap cukup relevan, yaitu: tingkat kompetisi Indonesia di dunia global (*Global Competitiveness*), indeks persepsi korupsi (*Corruption perception index*) dan indeks pengembangan SDM (*Human development index*).

Menurut indikator pertama, dalam tingkat kompetisi global tahun 2002, Indonesia berada pada posisi ke-72 dari 115 negara yang disurvei. Indonesia berada dibawah India yang menempati posisi ke-56, Vietnam pada posisi ke-60, dan Filipina pada posisi ke-66 (Mubyarto : 2003). Meskipun konfigurasi yang dibuat oleh *Global Economic Forum* ini lebih merupakan kuantifikasi dari aspek ekonomi dan bersifat relatif, tetapi secara umum prestasi tersebut juga merefleksikan kualitas dunia pendidikan kita.

Dari sudut persepsi publik terhadap korupsi tahun 2002, hasil survei yang dilakukan oleh *Transperancy International* dan *Universitas Göttingen* menempatkan Indonesia pada urutan ke-122. Indonesia

berada dibawah India yang menempati posisi ke- 83, Filipina pada posisi ke- 92, dan Vietnam pada posisi ke- 114. Mengingat sikap dan watak merupakan hasil pembinaan pendidikan, dunia pendidikan kita bisa dianggap '*liable*' terhadap perilaku korup. Implikasi indikator ini terhadap dunia pendidikan kita secara umum ialah proses pendidikan kita belum mampu secara signifikan menghasilkan lulusan yang bersih, jujur dan amanah.

Sedangkan menurut indikator pengembangan SDM tahun 2002, Indonesia menempati posisi ke- 112 dari 174 negara.15 data tersebut menempatkan Indonesia dibawah Filipina yang berada pada posisi ke- 85, China pada urutan ke-104, dan Vietnam pada posisi Ke- 109 (Mubyarto:2003). Namun tahun 2012, Indonesia menempati posisi yang lebih baik dari Vietnam. Jika dari segi ekonomi kita diakui secara jujur-belum siap bersaing apalagi dalam dunia pendidikan secara umum. Salah satu bukti ketidakpastian SDM kita bersaing secara global adalah level jabatan TKI kita di luar negeri rata-rata pekerja kasar, hanya sebageian kecil sebagai pekerja profesional, dan lebih sedikit lagi level pinpinan. Hal kersebut berbanding terbalim dengan TKA (*expatriates*) yang bekerja di Indonesia yang mayoritas menempati level profesional dan pinpinan

2. Tantangan dan kendala yang dihadapi dunia pendidikan Indonesia

Berbicara masalah pendidikan di Indonesia membahas hal yang sangat luas, dinamis, fluktuatif dan relatif. Oleh karena itu, kita hanya bisa mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia 'gagal' secara kategoris .sebenarnya pendidikan Indonesia telah banyak menghasilkan tokoh-tokoh nasional dan output yang berilyan dan kompetitif dari masa kemasa.

Kalau digeneralisasi bahwa dunia pendidikan kita sudah gagal, maka Republik ini sudah lama bubar. Salah satu contoh

keberhasilan pendidikan kita misalnya adalah menjamurnya sekolah-sekolahnya yang 'berprestasi' khususnya pada jenjang sekolah menengah yang dalm periode 1996-1997 sering dikenal sebagai SMU (sekarang kembali ke istilah Sekolah Menengah Atas atau SMA) 'unggulan' atau SMU 'plus.'17 dari studi pusat penelitian kebijakan, Balitbang Depdiknas terhadap 12 SMU yang dinilai berprestasi yang tersebar di beberapa propinsi di Indonesia, prestasi yang dicapai oleh sekolah berprestasi ini cukup melegakan.

Indikator pertama, NEM SMU berprestasi setiap tahunnya berada pada peringkat 1, 2, atau 3 ditingkat propinsi lokasi sekolah bersangkutan. NEM terentang dari 47,99 sampai 64,27. Sekitar 81,2% rata-rata NEM siswa SLTP (sekarang kembali ke istilah sekolah menengah pertama atau SMP) yang diterima di SMU berprestasi adalah 6,5 keatas. Kedua, sebagian besar guru SMU berprestasi memiliki pendidikan S1, hanya beberapa SMU yang memiliki beberapa guru S2, sarjana muda atau D3, bahkan SMU. Ketiga, kebanyakan SMU berprestasi memiliki sarana dan prasarana yang baik, yakni tanah yang cukup luas, tempat parkir, lapangan olah raga, tempat bermain atau jenis kegiatan lainnya, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, alat bantu pelajaran fisika, Biologi, Matematika serta berbagai peralatan eleltronik seperti video, TV, tape-recorder, sound system dalam lab bahasa, perangkat computer sebagai media belajar. Keempat, seluruh guru SMU berprestasi menyusun satuan pelajaran. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar meliputi: intra dan ekstrakurikuler. Guru umumnya menyampaikan materi dengan metode yang bervariasi meliputi: ceramah tanya jawab, diskusi, simulasi, resitasi, tugas membaca di perpustakaan, praktikum di laboratorium, dan pemanfaatan media belajar lainnya.

Disamping itu, siswa-siswa sekolah menengah Indonesia juga mengukir berbagai prestasi seperti menjadi juara umum dalam Olimpiade Fisika Asia (*OFA*) yang ke-4 yang diadakan di Thailand 20-29 April 2003. 18 Dalam Olimpiade Fisika Internasional (*OFI*) ke-34 yang berlangsung di Taipei, Taiwan, 2-11 Agustus 2003, Tim Olimpiade Fisika Indonesia berhasil mempertahankan peringkat enam besar dunia. 19 tahun 2003, siswa Indonesia masuk peringkat ke-13 dunia serta masuk perdelapan final dalam Kejuaraan Debat antar-siswa sekolah menengah tingkat dunia.

Tetapi, dalam skala luas dan pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak, bisa diidentifikasi beberapa kendala dan kelemahan, yang antara lain dalam aspek: (1) fasilitas belajar; (2) guru yang berkompentensi; (3) anggaran pendidikan; (4) manajemen pendidikan nasional; (5) partisipasi masyarakat dan orang tua; serta (6) relevansi sistem pendidikan dengan dunia kerja. Dalam identifikasi ini juga diulas usaha-usaha perbaikan yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah.

(1) Fasilitas Belajar

Fasilitas belajar sebanyak 49% bangunan Sekolah Dasar (SD) yang ada di Indonesia tak layak pakai. Selain itu 20% bangunan SD harus direhabilitasi total karena rusak berat. Berdasarkan data Depdiknas (2011), secara fisik di Indonesia ada 148.964 SD dengan 888.638 ruang kelas; 20.721 SMP 177.594 ruang kelas; dan 12.409 Sekolah Menengah 115.745 ruang kelas.

Kondisi sebagian ruang kelas amat memprihatinkan. Data lain menunjukkan bahwa pada tingkat SD, misalnya, sebanyak 518.451 ruang kelas dinyatakan rusak dan Tidak layak dipakai proses belajar mengajar. 22 kondisi gedung di Madrasah Ibtidaiyah lebih parah. Pada tingkat SMP dan SMA jumlah bangunan yang rusak juga tinggi

meski proporsinya tidak sebanyak SD. Keadaan demikian berlaku bagi sekolah swasta maupun negeri; juga bagi sekolah di luar pulau jawa maupun di pulau jawa.

Alat peraga dan bantu pembelajaran yang belum memadai, fasilitas olahraga, kesenian dan peralatan laboratorium yang kurang, computer yang ketinggalan zaman, dll, merupakan kenyataan yang harus diterima.

Sebuah survey menunjukkan bahwa persentase ketersediaan buku di sekolah hanya 20%. Dengan kata lain, satu eksemplar buku digunakan untuk 5 siswa. Padahal, pemerintah memprogramkan ketersediaan satu buku (teks wajib) yaitu satu orang siswa. Disamping itu, buku-buku perpustakaanpun masih sangat kurang.

Berbagai usaha telah dilakukan antara lain melalui pelatihan dan peningkatan kualifikasi guru, penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, sereta peningkatan mutu manajemen sekolah. Untuk perbaikan gedung sekolah, misalnya, dalam tahun ajaran 2002/2003 depdiknas dengan bantuan dana world bank meluncurkan program pembangunan 227 unit sekolah baru di 11 provinsi yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Dan dalam rangka menuntaskan program wajib belajar, tahun ajaran 2004/2005 pemerintah membuat terobosan dengan membangun 119 unit gedung SMP yang tersebar di 61 kabupaten/kota madya di 21 provinsi yang menelan total dana Rp 200 milyar. Pelaksanaanya, melibatkan partisipasi masyarakat sekitar dan pemda setempat (Slameto, 2003). Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang merata. Sebagian sekolah, terutama di perkotaan, menunjukkan peningkatan mutu yang cukup menggembirakan, namun sebagian lainnya masih memprihatinkan.

b. Guru yang berkompetensi

Dari segi kuantitas, sebenarnya tidak ada masalah serius dengan faktor guru ini. Menurut data Depdiknas (2001), siswa di sekolah dasar berjumlah 25.679.810 dengan guru sebanyak 1.128.475 (1:23). Untuk tingkat sekolah menengah pertama, terdapat 7.584.707 siswa yang dibimbing oleh 463.864 guru (1:16). Sedangkan untuk level sekolah menengah atas ada 4.872.451 siswa dan 354.648 guru (1:14). Angka-angka statistik yang sering *simplistic* memperlihatkan rasio guru dan siswa sudah cukup baik. Tetapi dilapangan, jumlah tenaga keguruan ini masih dirasakan kurang. Salah satu penyebabnya adalah penumpukan jumlah guru pada bidang studi tertentu dan kelangkaan guru dibidang studi yang lain, disamping kawasan urban memiliki daya tarik yang lebih pesat bagi guru dibandingkan di daerah yang terpencil sehingga terjadi distribusi guru yang tidak seimbang diantara dua kawasan tadi. Kalau demikian, yang bermasalah bukan rasio guru dan siswa, tetapi masalah distribusi dan kompetensi guru.

Harus diakui bahwa kualitas guru kita masih rendah. Menurut suatu hasil kajian mutakhir balitbang depdiknas, dari seluruh guru SD ternyata hanya sekitar 30% yang mampu mengajar dengan baik. Walaupun dengan maknitude yang berbeda, pola problematika yang hamper sama juga terlihat pada satuan pendidikan menengah. 24 ada beberapa faktor generic penyebab kurangnya kompetensi guru, diantaranya karena kesejahteraan guru masih rendah. Tidak banyak guru yang bisa bertahan hidup kalau hanya mengandalkan pendapatannya sebagai guru disuatu sekolah, yang memaksa banyak dari mereka untuk “nyambi” mengajar kemana-mana, atau ikut berbagai proyek kondisi seperti ini tidak saja menguras waktu, tenaga, dan konsentrasi mereka tetapi juga bisa menggeser niat dan

dedikasi sebagai pendidik yang lebih berorientasi pada pemenuhan materi.

Penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) dan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang sedang digiatkan oleh depdiknas membutuhkan guru yang berkompetensi.

Untuk mengatasi kurang meratanya distribusi tenaga guru ini, depdiknas membuat kebijakan pengangkatan guru bantu. Pada tahun 2003, depdiknas mengangkat sekitar 190.000 guru bantu pada tahun 2004 mengangkat sekitar 75.000 guru bantu.

Berbagai pelatihan peningkatan profesionalitas dan peningkatan kualifikasi guru telah sering diadakan. Peningkatan kualitas gureu secara umum mulai terlihat di daerah perkotaan dan didaerah terpencil dan terbelakang kondisinya masih tetap memprihatinkan. Artinya, faktor pemerataan peningkatan mutu guru masih perlu solusi yang lebih jitu.

c. Anggaran pendidikan

Alokasi anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD kita masih kecil. Masalah anggaran ini bukab masalah Indonesia saja. Tetapi Indonesia merupakan salah satu Negara yang paling kecil dengan mengalokasikan anggaran untuk pendidikan, yakni sekitar 4% dari APBN.

Pembiayaan merupakan salah satu faktor yang paling penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ini masih jauh dari target kesepakatan yang dihasilkan dalam KTT tentang Pendidikan (1992) yaitu minimal 25 persen dari APBN. Misalnya, tahun 2001 anggaran pendidikan di Indonesia sekitar 4,55% (Rp 13 triliun), tahun 2002 turun menjadi 3,76% (Rp 11,352 triliun), Dalam APBN 2003, persentasenya menjadisekitar 4%. Menurut produk domestic bruto (PDB), anggaran pendidikan kita secara nasional saat ini sekitar 1% dari PDB. Sedangkan di Negara-negara maju, anggaran tersebut bisa mencapai 4,5-7% dari

PDB. Di Negara berkembang biasanya berkisar antara 2, 5% hingga 7,5%. 25- salah satu dampak rendahnya anggaran pendidikan ini adalah semakin sempitnya kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga miskin dan terpinggirkan karena tidak mampu membiayai pendidikan putra-putri mereka. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (1998) mengungkapkan lebih dari 35% anak Indonesia yang berusia 10-14 tahun belum pernah menikmati pendidikan dan sekitar 32% anak tidak pernah tamat SD. Hingga saat ini angka tersebut akan terus membesar. Dalam tahun 2002 saja sedikitnya ada 7,5 juta pelajar SD terancam putus sekolah Karena ketiadaan biaya.

Rendahnya anggaran pendidikan ini juga mempengaruhi tingkat profesionalisme guru, ketersediaan infrastruktur pendidikan dan fasilitas belajar sebagaimana telah diungkapkan diatas.

Meningkatkan anggaran pendidikan menjadi Minimal 20% dari APBD di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Untuk mencapai amanah alokasi minimal ini tentu memerlukan banyak penyesuaian, tahapan, dan waktu.

d. Manajemen Pendidikan Nasional

Pemberlakuan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah menunjukkan niat baik Negara untuk Kelulusan siswa SMP dan SMA dalam UAN dengan passing grade 4,01. Setelah muncul protes di banyak tempat 'memaksa' Depdiknas mengeluarkan aturan baru yang terlihat tergesa-gesa yang tidak diantisipasi sebelumnya. Padahal, niat Depdiknas tersebut sudah bagus yakni untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan standar kelulusan. Angka drempel 4,01 itu sebenarnya masih di bawah standar kelulusan internasional yaitu 5,5 (6,0). Hanya saja, kebijakan menaikkan standar kelulusan tersebut tidak diawali atau diiringi dengan peningkatan kualitas manajemen,

Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional kita cenderung mengambil pendekatan *education production function* yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Artinya, dalam suatu produksi, yang harus diperhatikan tidak saja aspek input, tetapi juga prosesnya. Kita masih kurang memperhatikan dimensi 'proses' ini sehingga mutu outputnya menjadi rendah.

Penyelenggaraan pendidikan menggunakan pendekatan yang sentralistik sehingga sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi, yang kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat.

Dengan demikian, sekolah kehilangan kemandirian, motivasi, dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.

Salah satu kasus yang mengindikasikan lemahnya manajemen pendidikan kita adalah dikeluarkannya aturan oleh depdiknas tentang standar

guru, dan infrastruktur pendidikan secara signifikan.

Persepsi umum bahwa kebijakan pendidikan masih terkesan "*trial and error*" adalah seringnya perubahan yang tidak tuntas baik dalam tataran orientasi, kurikulum maupun system pembelajaran. Dalam beberapa kasus, faktor 'grant' tampaknya bias mengubah kebijakan pendidikan nasional kita menjadi proyek-proyek yang *fragmentatif* atau tidak komprehensif. Pengenalan pendekatan pembelajaran '*Contextual Teaching and Learning (CTL)*' misalnya masih terlihat sporadis dan arena berbagai kendala khususnya anggaran hanya sebagian kecil sekolah di Indonesia yang baru mampu melaksanakannya.

Kita juga akan melihat apakah kasusnya sama dengan penerapan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang direncanakan penerapannya tahun 2014. Aspek adaptabilitas dan kesinambungan dalam kebijakan pendidikan masih perlu dipikirkan dengan lebih serius.

Meskipun tanggung jawab pengelolaan system pendidikan nasional tetap di tangan pemerintah c.q Mendiknas, tetapi sejalan dengan desentralisasi dan otonomi, sekolah sebagai pelaksana pendidikan sudah diberikan tanggung jawab dan kemandirian dalam penyelenggaraan pendidikan. pemberlakuan UU Sisdiknas 2003 dan aturan-aturan lain yang merupakan penjabaran dan butir-butir legalitas yang statusnya lebih tinggi adalah salah satu contoh kebijakan yang ditimbulkan oleh kecenderungan ini.

e. Partisipasi Masyarakat dan Orang Tua

Partisipasi masyarakat dalam mengatasi problem pendidikan ditengarai masih rendah. Partisipasi masyarakat pada umumnya selama ini lebih banyak bersifat dukungan dana, tidak pada prosesnya pendidikan seperti pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas. Kebijakan yang diambil oleh Depdiknas dengan penerapan MBS yang antara lain mensyaratkan adanya dewan pendidikan dan komite sekolah bisa dipahami tidak saja sebagai strategi untuk meningkatkan kemandirian sekolah, tetapi juga mendorong agar masyarakat dan orang tua lebih aktif berpartisipasi dan terlibat dalam usaha peningkatan mutu pendidikan.

f. Relevansi terhadap pendidikan

Tingginya angka pengangguran merefleksikan ada 'sesuatu' dalam aspek relevansi pendidikan kita dengan dunia kerja. Meskipun masalah pengangguran bukan saja persoalan pendidikan tetapi juga masalah ekonomi, politik dan perdagangan, dll, tetapi sektor pendidikan ikut terkena liabilitas. Dalam tahun 2002, pencari kerja

terdaftar lulusan SD hingga sarjana mencapai 226,991 orang. Sedangkan jumlah setengah penganggur terpaksa dan sukarela mencapai 28.869.000 orang. Dalam tahun yang sama, jumlah penganggur terbuka mencapai 9.132.000 orang.

Pada masa mendiknas W. Djojo Negoro diperkenalkan *kebijakan 'link and match'*. antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Kebijakan tersebut tampaknya masih relevan dengan kondisi saat ini meskipun ia tetap memerlukan inovasi dan berbagai terobosan baru serta pengembangan khususnya kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan dunia kerja.

Saat dunia pendidikan kita cenderung terlalu banyak memompa peserta didik dengan pengetahuan tanpa memberikan waktu yang cukup kepada mereka untuk menyerap atau memahami dari pengetahuan tadi. Hal ini mengakibatkan pengetahuan menjadi tidak bermakna (*meaningless knowledge*) dan tidak dapat menjadi tontonan dari suatu skill yang bersifat dinamis. Selain itu, banyak pelajaran yang menjadi hafalan, sampai pelajaran matematika dibatalkan, sejarah pun dihafalkan tanpa dipahami, begitu juga agama dihafalkan tanpa peresapan dan pemahaman. Kondisi seperti ini bisa menjadi tabir yang menghalangi dunia pendidikan kita dengan perkembangan dan tuntutan dunia kerja yang terus berubah.

V. Alternatif: Pemberdayaan Peranan Keluarga

Sebelum membahas lebih jauh tentang urgensi penguatan peranan keluarga dalam pendidikan, banyak fenomena sosial yang memperlihatkan betapa institusi keluarga dan masyarakat memiliki daya yang sangat besar dalam pendidikan dan pembinaan generasi penerus. Secara geografis, historis dan *cultural phenomena* semacam ini bisa dikatakan bersifat universal.

Sampel yang cukup layak diambil adalah kasus Koto Gadang di Bukittinggi Sumatera Barat. 'Desa' (nagari) ini berhasil memanfaatkan secara optimal *ethische politiek* di sektor pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Sumatera Barat dalam masa peralihan abad ke-19 menuju abad ke-20. Kita mengenal Haji Agus Salim (dan cucunya, Emil Salim), Sutan Sjahrir, Bung Hatta, pejuang wanita Rohana Koeddoes, pujangga Chairil Anwar, penyair Hamid Jabbar, dan masih banyak lagi yang semuanya berasal dari Koto Gadang. Jika pada zaman awal politik etis saja, masyarakat desa itu sudah berbondong-bondong masuk sekolah, apalagi di zaman sekarang. Oleh karena itu tidaklah mengherankan kalau setiap rumah di Koto Gadang memiliki seorang sarjana dari berbagai disiplin ilmu.

Hingga saat ini pun banyak tokoh nasional, politikus, duta besar, pegawai, ahli politik, guru besar, seniman, pakar, jenderal, direktur berbagai perusahaan, menteri dan dokter berasal dari Koto Gadang.

Kalau dilihat dari aspek peranan keluarga, keberhasilan Koto Gadang sangat dimotivasi oleh kesadaran dalam keluarga dan masyarakat betapa pendidikan bisa membuka pintu perubahan status sosial dan perbaikan nasib. Kemampuan nagari yang luasnya hanya 268 hektar ini melahirkan banyak tokoh dikarenakan keluarga-keluarga di Koto Gadang sejak zaman penjajahan sampai sekarang tetap mengutamakan pendidikan. Kalau masyarakat dari daerah lain di Sumatera Barat pada umumnya pergi merantau untuk menuntut ilmu pengetahuan, kemudian jadi ambtenaar.

Kalau kita cermati kisah hidup tokoh-tokoh yang berasal dari sana, nyaris semuanya memperlihatkan bahwa watak dan motivasi untuk maju dan bersaing dibentuk dalam keluarga.

Demi kepentingan pendidikan, menurut sebuah laporan Soera Kamdjuan

Koto Gadang (1916), para orang tua yang waktu itu berpenghasilan rata-rata NLG 15,00 per bulan, sanggup membayar uang sekolah anaknya yang mencapai NLG 5,00 per bulan. Masyarakat membentuk sebuah badan tersendiri yang dinamai *studiefonds* (dana pendidikan) yang dibentuk untuk mengumpulkan dana dari orang kampung guna mengirim anak-anaknya melanjutkan studi di Jawa, dan bahkan di negeri Belanda.

Watak binaan keluarga disana juga membangun kemandirian dan jiwa bebas. Hal ini terlihat, misalnya, ketika Haji Agus Salim menamatkan pendidikannya di akhir 1920-an, beliau membuka Hollandsch-Indisch School (HIS) swasta di Koto Gadang. Dan tidak seorang pun putra beliau kecuali yang paling bungsu yang mendapatkan pendidikan formal di sekolah semuanya dididik oleh Agus Salim dan isteri beliau sendiri. Sebagaimana orang tua mereka, anak-anaknya juga menguasai banyak bahasa asing dan tidak ketinggalan dengan anak-anak yang sekolah di sekolah Belanda pada waktu itu. Alasan beliau cukup sederhana tetapi memiliki nilai nasionalisme yang dalam yaitu beliau tidak ingin anak-anaknya mendapatkan pendidikan di sekolah Belanda. Anak beliau yang paling kecil mengikuti pendidikan formal di sekolah karena waktu itu Indonesia sudah merdeka dan punya sekolah.

Kajian empiris juga memperlihatkan bahwa peranan keluarga dan orang tua berkaitan erat dan positif dengan prestasi belajar anak, sebuah studi tentang peran ayah terhadap prestasi anak yang dilakukan di SD Laboratorium Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, mendukung preposisi ini.

Dari dimensi spiritual dan keyakinan, keluarga memang harus dibina dan dipelihara baik dari perspektif dunia maupun akhirat. Target ideal suatu keluarga adalah menjadikan rumah kita sebagai surga kita dimana rumah harus menjadi penyejuk

dan penenang jiwa. Dalam suasana demikian pendidikan anak akan berjalan dengan baik.

Kata kunci adalah pembinaan keluarga kita secara berkesinambungan dan bertahap. Confusius (ca. 551-479 SM) menegaskan: *“To put the world right in order, we must first put the nation in order; to put the nation in order, we must first put the family in order; to put the family in order, we must first cultivate our personal life; we must first set our hearts right.”*

Hanya saja saat ini kita prihatin dengan semakin besarnya jumlah keluarga di Indonesia yang dirunding masalah. Keluarga yang pecah, *broken-home*, tidak harmonis, pasangan suami-isteri yang selingkuh menyebabkan keluarga tidak lagi menjadi surga bagi penghuninya. Keluarga yang demikian akan menghasilkan individu-individu yang berperilaku masa bodoh, tidak peduli hak orang lain, egois, dan kasar. Kondisi ini dimanfaatkan oleh perusak bangsa dengan merayu mereka hingga jatuh ke lembah pelacuran, pengedar-pecandu psikotropika dan narkoba, miras, pelaku kriminal, dll. Kondisi demikian juga membuat anak rentan terhadap pengaruh negatif globalisasi.

Dari aspek legal, hak orang tua untuk berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya dijamin dengan undang-undang.

Disamping itu, orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar pada anaknya.

Arus globalisasi baik dari segi ekonomi, politik, perdagangan, dan cultural kalau mau jujur, sedikit sekali membawa efek positif bagi Negara-negara berkembang dan lemah. Kalau Negara-negara yang termasuk *‘the south’* kurang asertif dan kritis, globalisasi bisa menjelma menjadi instrumen baru bagi Negara-negara maju, yaitu neokolonialisme terselubung. Penguatan peranan keluarga dalam

pendidikan anak bukan satu-satunya metode untuk menghadapi globalisasi tetapi merupakan salah satu alternatif solusi permasalahan pendidikan. Artinya, penguatan fungsi tersebut harus ditopang oleh perbaikan dalam aspek-aspek lain seperti *political will* dan kebijakan pemerintah.

Keluarga merupakan taman pendidikan pertama, terpenting dan terdekat yang bisa dinikmati oleh anak. Oleh karena itu, Ki Hadjar Dewantoro memahami bahwa pendidikan bagi bangsa Indonesia mesti dilakukan melalui 3 lingkungan yaitu keluarga, sekolah, dan organisasi.

Menurut Idris dan Jamal (1992), peranan orang tua dalam mendidik anak adalah memberikan dasar pendidikan, sikap dan watak, dan keterampilan dasar seperti pendidikan agama, budi pekerti, sopan-santun, estetika, kasih sayang, rasa aman, dasar-dasar mematuhi peraturan, serta menamakan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan disiplin. Di lingkungan keluarga seorang anak manusia mengenal nilai dan norma kehidupan. Keluargalah yang melahirkan manusia-manusia yang akan terjun ke masyarakat. Perilaku seseorang di masyarakat adalah cermin dari keluarganya. Disini perilaku ditekankan bahwa teladan dari orang tua sangat berkesan dalam diri anak hingga mereka dewasa dan memiliki anak.

Sejalan dengan modernisasi, sekolah memang berperan sebagai *in loco parentis* atau mengambil alih peran orang tua. Tetapi institusi sekolah tidak akan mampu mengambil alih seluruh peran orang tua dalam pendidikan anak. Globalisasi, kalau ditinjau dari dampak kultural dan kemajuan teknologi, merupakan wahana ‘penjajahan’ oleh kultur yang dominan. Nilai-nilai budaya yang dominan ini yang sebagian besar tidak sesuai dengan timbangan moral Indonesia sudah menembus kamar-kamar dan sekeliling kita. Dalam konteks ini, keluarga bisa dimetafora sebagai sebuah

benteng yang mampu menciptakan ‘imunisasi’ bukan ‘sterilisasi’. Pendekatan imunisasi bermakna bahwa anak tetap berperan aktif dalam lingkungan global tetapi pendidikan dalam keluarga memberinya kekebalan terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari globalisasi. Dengan kata lain, putu-putri kita diarahkan untuk secara optimal meraih manfaat dan nilai positif dari globalisasi. Idealnya, kita arahkan mereka untuk menjadi ‘pemain’, bukan ‘penonton’ apalagi ‘obyek’ globalisasi. Sedangkan ‘sterilisasi’ akan berdampak kurang baik bagi pertumbuhan anak dan bisa menumbuhkan sikap eskapisme dan isolative. Sebagai antidote, Negara-negara lemah ini harus bersatu dan sedikit ‘nekad’. Usaha Amerika Serikat dan Uni-Eropa menyusun kembali aturan perdagangan gagal dalam KTT WTO di Cancun, Mexico, September 2003 membuktikan berhasilnya strategi ini.

Pendidikan dalam lingkungan keluarga sebaiknya diberikan sedini mungkin. St. Franciscus Xaverius mengatakan: “*Give me the children until they are seven and anyone may have them afterward.*” Sedangkan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib (RA), seorang sahabat utama Rasulullah Muhammad (SAW), menganjurkan: Ajaklah anak pada usia sejak lahir sampai tujuh tahun bermain, ajarkan anak peraturan atau adab ketika mereka berusia tujuh sampai empat belas tahun, pada usia empat belas sampai duapuluh satu tahun, jadikanlah anak sebagai mitra orangtuanya.

Ketika anak masuk ke sekolah mengikuti pendidikan formal, dasar-dasar karakter anak ini sudah terbentuk. Anak yang sudah memiliki watak yang baik biasanya memiliki *achievement motivation* yang lebih tinggi karena perpaduan antara *intelligence quotient*, *emotional quotient* dan *spiritual quotient* sudah mulai terformat dengan baik. Di samping itu, hal tersebut

bisa pula mengurangi beban sekolah dengan pemahaman bahwa sekolah bisa lebih berfokus pada aspek untuk mengembangkan potensi kognitif, afektif dan motorik. Pada gilirannya, beban pemerintah secara tidak langsung juga bisa dikurangi.

KESIMPULAN

Merujuk pada pertanyaan elaboratif di awal tulisan, kita bisa menyimpulkan, pertama, bahwa dalam berbagai takaran dan ukuran dunia pendidikan kita belum siap menghadapi globalisasi. Belum siap tidak berarti bangsa kita akan hanyut begitu saja dalam arus global tersebut. Kita harus menyadari bahwa Indonesia masih dalam masa transisi dan memiliki potensi yang sangat besar untuk memainkan peran dalam globalisasi khususnya pada konteks regional. Inilah salah satu tantangan dunia pendidikan kita yaitu menghasilkan SDM yang kompetitif dan tangguh. Kedua, dunia pendidikan kita menghadapi banyak kendala dan tantangan. Namun dari elaborasi di atas, kita optimis bahwa masih ada *kans* bahwa masalah-masalah dan kendala tadi bisa dijadikan peluang. Ketiga, alternatif yang ditawarkan disini adalah penguatan fungsi keluarga dalam pendidikan anak dengan penekanan pada pendidikan informal. Sebagian dari pendidikan formal anak di sekolah. Kesadaran yang tumbuh bahwa keluarga memainkan peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak akan membuat kita lebih hati-hati untuk tidak mudah melemparkan ‘kesalahan’ dunia pendidikan nasional kepada otoritas dan sektor-sektor lain dalam masyarakat, karena mendidik itu ternyata tidak mudah dan harus lintas sektoral. Semakin besar kuantitas individu dan keluarga yang menyadari urgensi peranan keluarga ini, maka semakin cepat tumbuhnya kesadaran kompetitif di tengah-tengah bangsa kita sehingga mampu bersaing di atas gelombang globalisasi ini.

Daftar Rujukan

- Balitbang, Depdiknas. 'Profil Sekolah "Berprestasi"', Pada: <http://www.depdiknas.go.id/balitbang/00-informatika-serbi.htm>.
- Centre For The Betterment Of Education, 'dialog komunitas pendidikan (DKP) 2004, pada <http://www.cbe.or.id/comments.php>
- Cox, R. (1994). 'Global Restructuring: making sense of the changing international political economy', dalam R. Stubbs dan G.R.D Underhill (eds.) *Political economy and the changing global order*. London. Macmillan.
- Depdiknas (2003). Pasal 29(1), UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Depdiknas, Dirjen Dikdasmen, Jakarta 2003.
- Depnakertrans (2003). Tenaga Kerja Asing (TKA) menurut jabatan, Tahun 2003, Depnakertrans, Ditjen Binapendagri, data bulan November 2003.
- Friedman, M. (1993, 31 Mei). 'Cooperation, competition go hand in hand'. *Nikkei weekly*.
- Giddens, A. (1990). *The consequences of modernity*. Cambridge: Polity Press.
- Idris, Z. dan L. Jamal (1992). "Pengantar pendidikan". Jakarta: Grasindo.
- Jacson, R. dan G. Sorensen (2003). 'Introduction to International Relations': theories and approaches. Oxford: Oxford University Press.
- Jasmi K. (2001, 27 Oktober). 'Koto Gadang, tiap rumah ada sarjana'. *Republika*.
- Ki Supriyoko (2004, 5 Mei). 'Determinan kelambanan pendidikan'. *Kompas*
- Kotter, P (1955). 'The new rules how to succeed in today's post-corporate world'. New York: The Free Press.
- Leys, C. (2001). *Market-Driven Politics: Neoliberal democracy and the public interest*. London: Verso Books.
- Mubyarto (2003, Januari). 'Pelaksanaan Sistem Ekonomi Pancasila di Tengah Praktek Liberalisasi Ekonomi di Indonesia'. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Tahun I, No.11.
- Nasution, N. (2003, 16 Juli). 'Anak Kita Masa Depan Bangsa'. *DPP Partai Keadilan Sejahtera*.
- Qur'an Surah At-Tahrim (Q.S.66:6).
- Redaksi (2004, 4 Mei). "Potret Suram Guru Indonesia". *Sinar Harapan*.
- Redaksi (2003, 13 Agustus). 'Prestasi di Tengah Cai Maki'. *Media Indonesia*.
- Redaksi (2003, 8 Mei). 'Potensi SDA Terbentang, SDM Malang Melintang'. *Kompas*.
- Robertson, R. (1992). *Globalization: Social Theory and Global Culture*. London: Sage Pub.
- Scholte, J.A. (2000). *Globalization: A critical Introduction*. London; Palgrave.
- Suparman, E. (2004). 'Manajemen Pendidikan Masa Depan', Depdiknas.
- Slameto (2002). 'Peranan Ayah dalam Pendidikan Anak dan Hubungannya dengan Prestasi Belajarnya'. *Satya Wydya*, Vol.15, No,1.
- Surya, Y. (2003, 29 April). 'Indonesia juara umum Olimpiade Fisika Asia ke-4', Situs "fisika.net". Lembaga Ilmu.
- Transparency International & Gottingen University (2004, 21 Mei), pada: <http://www.gwdg.de/uwvw>
- United Nations Development Programme (2004, 21 Mei). 'Human Development Report 2003', pada: <http://hdr.undp.org/report/global/2003>.
- UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Dirjen Dikdasmen, Jakarta 2003.
- Waltz, K.N. (1979). *Theory of International Politics*. New York: McGraw-Hill;
- World Economic Forum (2004, 21 Mei), pada : <http://www.weforum.org>.
- Yunaldi (2000, April). 'Koto Gadang, Desa Tokoh Terkenal'. *Kompas*, pada: <http://www.kompas.com/kompascetak/0005/01/DAERAH/kota30.htm>.